

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN AKHIR TAHUN ANGGARAN 2022



**DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAMHRAGA
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipersembahkan kehadirat Allah SWT, karena atas limpahan rahmatnya Dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2022 Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga ini dapat diselesaikan dengan baik. Dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2022 merupakan laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menyangkut pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran.

Dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2022 menjadi dokumen laporan hasil kerja setiap perangkat daerah mengenai capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab dan kewenangannya.

Demikian Dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2022 ini disusun sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada peningkatan kinerja.

Painan, Januari 2023
Kepala Dinas Pariwisata, Kepemudaan
dan Olahraga,



SUHENDRI, S.Pd, M.Si

NIP. 19670723 199512 1001

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
BAB I PENDAHULUAN	3
1.1. Latar Belakang	3
1.2. Dasar Hukum	4
1.3. Maksud dan Tujuan	6
BAB II HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN PESISIR SELATAN	7
2.1 Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah	7
2.2 Kebijakan Strategis	19
2.3 Tindaklanjut Rekomendasi DPRD Kabupaten Pesisir Selatan atas LKPJ Bupati Pesisir Selatan Akhir Tahun Anggaran 2022	20
BAB III CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN	21
3.1 Identifikasi tugas Pembantuan urusan Pemerintahan yang diterima dari Pemerintahan tingkat di atasnya	21
3.2 Identifikasi tugas Pembantuan urusan Pemerintahan yang diberikan kepada tingkatan Pemerintahan tingkat dibawahnya	21
BAB IV PENUTUP	22

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Akhir Tahun Anggaran Tahun 2022 disusun sebagai amanat dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Kepala Daerah menyampaikan LKPJ kepada DPRD yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

LKPJ memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menyangkut pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran yang kemudian dibahas oleh DPRD untuk menghasilkan rekomendasi perbaikan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Berdasarkan peraturan tersebut di atas, pada Tahun 2022 Bupati Pesisir Selatan berkewajiban untuk menyampaikan LKPJ Bupati Pesisir Selatan Akhir Tahun Anggaran 2022 kepada DPRD Kabupaten Sumatera Barat. LKPJ ATA 2022 Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga disusun berdasarkan Kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 07 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 157 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021. Pelaksanaan kebijakan tersebut tidak terlepas dari perencanaan jangka menengah yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026 dan perencanaan tahunan yang tertuang dalam Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 20 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021.

LKPJ Bupati Pesisir Selatan ATA 2022 tersebut, selanjutnya akan dibahas

oleh DPRD Kabupaten Pesisir Selatan. Hasil pembahasan tersebut diharapkan dapat ditetapkan menjadi keputusan DPRD Kabupaten Sumatera Barat, yang dijadikan sebagai rekomendasi untuk dasar perbaikan penyelenggaraan pemerintahan di Pemerintah Daerah Kabupaten Sumatera Barat.

Berdasarkan pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, maka disusunlah Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga tahun 2022.

Dengan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) tersebut diharapkan, dapat dilihat dan diukur kinerja Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga selama satu tahun anggaran yang meliputi capaian pelaksanaan program dan kegiatan. Selain itu, laporan ini diharapkan mampu menyajikan pelaporan yang akuntabel, terbuka, transparan dan berlandaskan hukum, sehingga mampu mewujudkan pemerintahan yang efektif, bersih dan profesional.

1.2. Dasar Hukum

Ketentuan-ketentuan yang menjadi pedoman dalam penyusunan LKPJ Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Akhir Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antar Pemerintah, Pemerintahan Daerah Kabupaten, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 yang selanjutnya diubah lagi dengan Peraturan Menteri Tahun 2016;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2005-2025;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2021 tanggal 30 Desember 2021, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022.
26. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2022 tanggal 18 Oktober 2022, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022.
27. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 157 Tahun 2021, tanggal 30 Desember 2021, tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022.
28. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 75 Tahun 2022, tanggal 18 Oktober 2022, tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022.
29. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 24 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022.

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Laporan keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2022 Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan mempunyai maksud sebagai bentuk pertanggungjawaban Kepala Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta kewenangannya dalam mengelola sumber daya dan kemampuan manajerial secara efektif dan efisien yang sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan oleh Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan. Sedangkan tujuan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) ini adalah:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Sebagai evaluasi dan upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerja.

BAB II
HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN
DINAS PARIWISATA, KEMUDAAN DAN OLAHRAGA

2.1 Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Pada Tahun 2021 Urusan Pilihan Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga diselenggarakan oleh Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 13.504.818.803,00 dengan realisasi Rp. 12.877.698.292,00 (95,36%). Adapun realisasi Program dan Kegiatan Urusan Pilihan Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga dapat dilihat pada tabel berikut:

NO	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Ket.	
									(Rp.)	(Rp.)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Urusan Kepemudaan dan Olahraga	Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga	1. Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 20 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2021	A PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					4.554.592.248	4.401.600.472		
				I Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Renstra 2021-2026					47.003.085	46.826.700	
				1 <i>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat daerah (dokumen)	<i>dok</i>	<i>36 dok</i>	100%	47.003.085	46.826.700		
				II Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terbayarlah Gaji dan Tunjangan ASN	<i>bulan</i>	<i>12 bulan</i>	100%	3.629.128.463	3.497.810.480		
				1 <i>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN (orang/bulan)	<i>Orang/bulan</i>	<i>504orang/bulan</i>	100%	<i>3.514.073.946</i>	<i>3.390.108.750</i>		

NO	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Ket.
									(Rp.)	(Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				2 <i>Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN (dokumen)	<i>Dok</i>	12 <i>dok</i>	100%	115.054.517	107.701.730	
				IV Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Umum (bulan)	<i>bulan</i>	12 <i>bulan</i>	100%	386.056.210	278.731.600	
				1 <i>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</i>	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan (paket)	<i>Paket</i>	12 <i>paket</i>	100%	14.471.490	14.471.000	
				2 <i>Penyediaan Bahan Logistik Kantor</i>	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan (paket)	<i>paket</i>	12 <i>paket</i>	100%	43.394.140	43.394.000	
				3 <i>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</i>	Jumlah Barang Cetak dan Pengandaan yang disediakan (paket)	<i>paket</i>	12 <i>paket</i>	100%	30.930.580	30.760.250	
				4 <i>Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan</i>	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan (dokumen)	<i>dok</i>	12 <i>dok</i>	100%	3.600.000	3.600.000	
				5 <i>Fasilitasi Kunjungan Tamu</i>	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (laporan)	<i>Laporan</i>	12 <i>laporan</i>	100%	68.000.000	67.965.000	
				6 <i>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (laporan)	<i>laporan</i>	12 <i>laporan</i>	100%	225.650.000	223.738.907	

NO	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Ket.
									(Rp.)	(Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				VI Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>bulan</i>	12 bulan	100%	215.640.050	193.539.306	
				1 <i>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	<i>laporan</i>	<i>12 laporan</i>	100%	42.451.350	39.553.003	
				2 <i>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</i>	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	<i>laporan</i>	<i>12 bulan</i>	100%	173.188.700	173.188.000	
				VI I Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpelihara Barang Milik Daerah (bulan)	<i>bulan</i>	12 bulan	100%	276.774.440	291.479.880	
				1 <i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</i>	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (unit)	<i>unit</i>	<i>6 unit</i>	100%	225.560.760	209.236.132	
				2 <i>Pemeliharaan Mebel</i>	Jumlah Pemeliharaan Mebel (unit)	<i>unit</i>	<i>4 unit</i>	100%	5.000.000	5.000.000	
				3 <i>Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara (unit)	<i>unit</i>	<i>24 unit</i>	100%	12.543.680	12.480.000	
				4 <i>Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</i>	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (unit)	<i>unit</i>	<i>1 unit</i>	100%	33.670.000	32.577.000	

NO	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Ket.
									(Rp.)	(Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				B PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN					979.999.920	978.418.880	
				I Penyebaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha MudaPemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Terlaksananya Keg. Pemuda Pelopor dan Pembentukan Paskibra Kab. Pessel	<i>bulan</i>	<i>12 bulan</i>	100%	699.999.920	691.018.880	
				1 Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota yang Diseleksi sebagai Pasukan Pengibar Bendera dan Diberikan Peltihan (Orang)	<i>orang</i>	<i>73 orang</i>	100%	699.999.920	691.018.880	
				II Pemberdayaan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	<i>bulan</i>	<i>12 bulan</i>	100%	280.000.000	280.000.000	
				1 Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan (Dokumen)	<i>dok</i>	<i>10 dok</i>		280.000.000	280.000.000	
				C PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN					4.160.126.115	4.135.417.379	

NO	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Ket.
									(Rp.)	(Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				I Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan olahraga	bulan	12 bulan	100%	2.472.172.855	2.448.390.834	
				1 <i>Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota</i>	Jumlah Saran dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan (unit)	<i>unit</i>	<i>4 unit</i>	100%	2.472.172.855	2.448.390.834	
				II Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Telaksananya Pembinaan dan Pengembangan Olahraga	orang	orang	100%	1.687.953.260	1.687.026.545	
				1 <i>Pengembangan Organisasi Keolahragaan</i>	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan (dokumen)	<i>dok</i>	<i>4 dok</i>	100%	1.687.953.260	1.687.026.545	
				D PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPAMUKRAAN	% Organisasi Pemuda Yang Aktif				284.987.300	249.987.300	
				I Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Terlaksananya Ke. Pemuda Pelopor dan Pembentukan Paskibra Kab. Pessel	Laporan	1 Laporan	100%	284.987.300	249.987.300	
				1 <i>Pengembangan Organisasi Kepramukaan</i>	Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah (Laporan)	<i>laporan</i>	<i>1 laporan</i>	100%	284.987.300	249.987.300	
2	Urusan Kepariwisata	Dinas Pariwisata	1. Peraturan	E PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA					696.433.750	6.331.896.561	

NO	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Ket.
									(Rp.)	(Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Kepemudaan dan Olahraga	Bupati (PERBUP) Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 20 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2021	I Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengelolaan Objek Wisata	<i>bulan</i>	12 bulan	100%	696.433.750	632.729.950	
				1 <i>Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota</i>	Jumlah Dokumen Perencanaan Pengembangan Daya Tarik wisata Kab/Kota (dokumen)	<i>Dok</i>	<i>3 dok</i>	100%	<i>696.433.750</i>	<i>632.729.950</i>	
				II Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengelolaan Destinasi Pariwisata	<i>bulan</i>	12 bulan	100%	7.451.586.002	7.381.156.610	
				1 <i>Pengadaan/Pemeliharaan/R ehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota</i>	Jumlah Srana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara (unit)	<i>unit</i>	<i>3 unit</i>	100%	<i>6.758.423.160</i>	<i>6.698.857.572</i>	
				2 <i>Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota</i>	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota (dokumen)	<i>bulan</i>	<i>12 bulan</i>	100%	<i>44.763.700</i>	<i>44.763.700</i>	
				3 <i>Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota</i>	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota (laporan)	<i>laporan</i>	<i>4 laporan</i>	100%	<i>648.399.142</i>	<i>637.535.338</i>	
				G PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF					1.062.074.358	952.115.310	

NO	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Ket.
									(Rp.)	(Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				I Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	<i>bulan</i>	12 bulan	100%	1.062.074.358	952.115.310	
				1 Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah SDM Pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat Dasar yang dikembangkan Kompetensinya (orang)	<i>orang</i>	112 orang	100%	280.000.000	267.383.080	
				2 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembanagan Kemitraan Pariwisata (orang)	<i>orang</i>	200 orang	100%	598.337.858	501.215.0330	
				3 Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas proses kreasi produksi distribusi, konsumsi ekonomi kreatif (laporan)	<i>laporan</i>	1 laporan	100%	183.736.500	183.516.900	
									19.189.799.693	18.731.425.901	97.61 %

- Sasaran Strategis PK Kepala OPD

No	Sasaran Strategis	Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	Terwujudnya Pesisir Selatan menjadi daerah tujuan wisata favorit di	Prog. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Wisatawan (Orang)	1.200.000	944.540	78.71%

No	Sasaran Strategis	Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)				
1	2	3	4	5	6	7				
	pantai barat Indonesia	Prog. Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata								
		Prog. Pemasaran Pariwisata								
		Prog. Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif								
		Prog. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					Lama tinggal Wisatawan (Hari)	1.25	1,25	100%
		Prog. Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata								
		Prog. Pemasaran Pariwisata								
		Prog. Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif								
2	Meningkatnya SDM kreatif dan berdaya saing	Prog. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pemuda berprestasi tingkat provinsi dan nasional (Orang)	10	17	170%				
Prog. Pengembangan Kapasitas Daya Saing										

No	Sasaran Strategis	Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
		Kepemudaan				
		Prog. Pengembangan Daya Saing Keolahragaan				

- **Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja**

a. **Terwujudnya Pesisir Selatan menjadi daerah tujuan wisata favorit di pantai barat Indonesia**

**Jumlah Kunjungan Wisatawan (Target Kinerja :1.200.000 Orang)
(Realisasi Kinerja : 944.540 Orang)**

**Rata-Rata Lama Tinggal Wisatawan (Target Kinerja :1,25 Hari)
(Realisasi Kinerja : 1,25 Hari)**

yang meliputi Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RPJMD dengan Renstra, Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara Renstra dengan Renja, Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RPJMD dengan RKPD serta Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RKPD dengan KUA PPAS. Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan :

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan kegiatan sebagai berikut:
 - (1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan output kegiatan ini adalah tersedianya Renstra 2021-2026.
 - (2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan output terbayarnya gaji dan tunjangan ASN.
 - (3) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan output terpenuhinya kebutuhan administrasi umum.
 - (4) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan outputtersedianya jasa penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
 - (5) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan output terpeliharanya Barang Milik Daerah.
- Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata, dengan kegiatan sebagai berikut :
 - (1) Kegiatan Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota, dengan output terlaksananya pengelolaan objek wisata.
 - (2) Kegiatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota, dengan output terlaksananya pengelolaan destinasi pariwisata
- Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif, dengan kegiatan sebagai berikut :
 - (1) Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar, dengan output terlaksananya peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif.

b. Meningkatnya SDM kreatif dan berdaya saing

Jumlah pemuda berprestasi tingkat provinsi dan nasional(Target Kinerja :10 Orang) (Realisasi Kinerja : 17 Orang)

yang meliputi Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RPJMD dengan Renstra, Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara Renstra dengan Renja, Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RPJMD dengan RKPD serta Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RKPD dengan KUA PPAS. Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan :

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan kegiatan sebagai berikut:
 - (1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan output kegiatan ini adalah tersedianya Renstra 2021-2026.
 - (2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan output terbayarnya gaji dan tunjangan ASN.
 - (3) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan output terpenuhinya kebutuhan administrasi umum.
 - (4) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan output tersedianya jasa penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
 - (5) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan output terpeliharanya Barang Milik Daerah.
- Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan, dengan kegiatan sebagai berikut:
 - (1) Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha MudaPemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota, dengan output terlaksananya keg. pemuda pelopor dan pembentukan paskibra Kab. Pessel.
 - (2) Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan TingkatDaerah Kabupaten/Kota dengan Output tersedianya organisasi Kepemudaan Kabupaten Pesisir Selatan.
- Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan, dengan kegiatan sebagai berikut:
 - (1) Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, dengan outputterlaksananya pembinaan dan pengembangan olahraga.
 - (2) Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga, dengan outputtelaksananya pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga.

- Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan, dengan kegiatan sebagai berikut:
 - (1) Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan, dengan output terlaksananya pembinaan dan pengembangan Kepramukaan.

- PERMASALAHAN DAN SOLUSI

a. PERMASALAHAN

1. Terhadap Pemeliharaan Aset Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga yang bertambah cukup signifikan karena adanya mutasi Aset dari Dinas PU tidak di dukung dengan biaya Pemeliharaan sehingga menyebabkan kurang maksimalnya pemeliharaan terhadap Aset Disparpora.
2. SDM ASN yang masih kurang sehingga masih ada tugas-tugas yang dirangkap oleh satu pegawai yang bukan keahliannya.
3. Belum maksimalnya pencapaian target PAD disebabkan kurangnya biaya operasional dan belum maksimalnya pengelola wisata berbayar.
4. Kurangnya kegiatan event Pemerintah dan Promosi Pariwisata melalui media sosial sehingga kurangnya kunjungan wisata.
5. Belum terdatanya secara baik objek wisata dan ekonomi kreatif.

b. SOLUSI

1. Dikembalikan ke PU atau diserahkan ke Pemerintah setempat.
2. Kiranya ada penambahan ASN sehingga jika seseorang berhalangan ada ASN yang lain yang bisa menggantikannya sehingga tidak tergantung pada satu orang.
3. Perlu penetapan target PAD yang realistis yang seiring dengan dana operasional yang memadai.
4. Perlunya event Pariwisata baik yang bersinergi dengan pihak lain maupun Disparpora mulai dari skala Nagari hingga Nasional.
5. Dengan Aplikasi SIPPORA maka akan terdata semua objek wisata dan ekonomi kreatif.

2.2 Kebijakan Strategis

Tabel 2.2
Kebijakan Strategis Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
1	2	3	4
1	Menetapkan kelompok Sadar wisata (Pokdarwis) dan atau ekonomi kreatif melalui Surat Keputusan Kepala Dinas	Keputusan Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : - 556/ 14/ SK/DPPO-PS/2022 - 556/ 15/ SK/DPPO-PS/2022 - 556/16/DPPO-SK/2022 - 556/ 18 /DPPO-SK/2022 - 556/029/DPPO-SK/2022 - 556/ 30 / SK/DPPO-PS/2022 - 556/ 031/ SK/DPPO-PS/2022 - 556/ 039 / SK/DPPO-PS/2022 - 556/ 40 / SK/DPPO-PS/2022 - 556/ 42 / SK/DPPO-PS/2022 - 556/60/ SK/DPPO-PS/2022 - 556/61 / SK/DPPO-PS/2022 tentang Pengukuhan Kelompok Sadar Wisata Pasisia	Dengan Penunjukan Kelompok Sadar Wisata maka untuk kedepannya lebih bekerjasama dengan Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga untuk pengembangan dan pengelolaan destinasi wisata di daerah masing-masing .

2.3 Tindaklanjut Rekomendasi DPRD Kabupaten Pesisir Selatan atas LKPJ Bupati Pesisir Selatan Akhir Tahun Anggaran 2022

Tabel 2.3
Tindaklanjut Rekomendasi DPRD Kabupaten Pesisir Selatan
Atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban
Akhir Tahun Anggaran 2021

No	Rekomendasi DPRD	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD (Program/ Kegiatan Dan Anggaran)	Tujuan/ Masalah Yang Diselesaikan
1	2	3	4
1	Untuk meningkatkan kenyamanan pengunjung atau wisatawan ke Pesisir Selatan maka diminta pada Pemerintah Daerah melalui Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga agar dapat menerapkan sapta pesona (aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah dan kenangan) di kawasan wisata.	Dalam rangka meningkatkan Kenyamanan Pengunjung atau wisatawan maka terdapat kegiatan DAK NON FISIK 2023 Program : Program Pemasaran Pariwisata dan Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kegiatan : Pemasaran Pariwisata dan Luar Negeri Daya Tarik, destinasi dan kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/kota dan Pelaksanaanya Peningkatan Kapasitas sumber daya manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat dasar. Anggaran : Rp. 1.400.000.000,-	Tersedianya Sumber daya Manusia yang berwawasan Sapta Pesona
2	Agar Pemerintah Daerah meningkatkan serana dan prasarana dilokasi wisata yang sudah ada dan pembenahan terhadap destinasi wisata baru yang ada di Pesisir Selatan.	Dalam rangka optimalisasi pengelolaan objek wisata semangki dilakukan pemeliharaan berupa kegiatan pengadaan rehabilitasi Program : Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata Kegiatan : Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Anggaran : Rp. 270.000.000,-	Menambah Kepuasan dan meningkatkan daya tarik wisata semangki
3	Agar Pemerintah Daerah melalui Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan dapat melestarikan atau menampilkan kembali budaya tradisional melalui ivent-ivent kebudayaan dan wisata di Pesisir Selatan, dalam rangka memancing minat wisatawan yang datang ke Pesisir	Untuk Melestarikan dan menampilkan kembali budaya tradisional melalui event-event kebudayaan maka diadakan kegiatan Pelaksanaan Event Desa Wisata 2023 Program : Pemasaran Pariwisata Kegiatan : Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategi Pariwisata Kabupaten/Kota Anggaran : Rp. 25.000.000,0	Dalam rangka meningkatkan wisata di Kabupaten Pesisir Selatan maka Promosi pariwisata untuk menambah jumlah wisatawan sebagai bentuk usaha peningkatan perekonomian

No	Rekomendasi DPRD	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD (Program/ Kegiatan Dan Anggaran)	Tujuan/ Masalah Yang Diselesaikan
1	2	3	4
	Selatan.		
4	Untuk meningkatkan PAD di lokasi wisata agar dinas pariwisata melakukan inovasi terhadap pintu masuk lokasi wisata satu pintu dengan elektronik serta menertibkan pajak rumah makan dan restoran dan hotel.	Untuk Lebih meningkatkan PAD Kabupaten Pesisir Selatan maka harus ada suatu inovasi untuk itu kegiatan yang dilakukan yaitu Program : Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata Kegiatan : DED Pembangunan Pagar Pantai Carocok Anggaran : 42.872.500,-	Meminimalisasi tingkat kebocoran penerimaan PAD di kawasan Pantai Carocok Painan
5.	Dengan keterbatasan APBD diminta pada jajaran Dinas Pariwisata. Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan mengajukan proposal kepusat untuk peningkatan sarana dan prasarana fisik di lokasi wisata.	Dinas Pariwisata sudah mengajukan ke pusat dan sudah mendapatkan DAK Fisik 2023 Program : Pembangunan Amenitas dan Atraksi Kawasan Wisata Alam (Non Bahari) Kegiatan : Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas Anggaran : Rp. 3.358.776.000,-	Terbukanya Destinasi wisata baru dan meningkatkan PAD Kab. Pesisir Selatan

BAB III
CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN
DAN PENUGASAN

3.1. IDENTIFIKASI TUGAS PEMBANTUAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DITERIMA DARI PEMERINTAH TINGKAT DIATASNYA

Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga pada tahun anggaran 2022 tidak melaksanakan tugas pembantuan dan penugasan.

3.2. IDENTIFIKASI TUGAS PEMBANTUAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DIBERIKAN KEPADA TINGKATAN PEMERINTAHAN DIBAWAHNYA

Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga pada tahun anggaran 2022 tidak melaksanakan tugas pembantuan dan penugasan.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Pesisir Selatan Akhir Tahun Anggaran 2022 (LKPJ ATA) merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan selama 1 (satu) tahun yang dilaksanakan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan serta evaluasi terhadap seluruh program dan kegiatan pembangunan.

Secara prinsip dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah berjalan cukup optimal meskipun terjadi bencana non alam Pandemi COVID-19, merupakan hasil sinergi dan wujud efisiensi serta efektivitas pembangunan oleh seluruh elemen pemerintahan yang tercermin dalam pencapaian target pembangunan. Di sisi lain, masih terdapat beberapa kelemahan dan permasalahan yang muncul yang salah satunya diakibatkan oleh berbagai dinamika global maupun perkembangan eksternal yang kurang terantisipasi. Berbagai kelemahan ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi sebagai acuan perbaikan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada tahun-tahun mendatang.

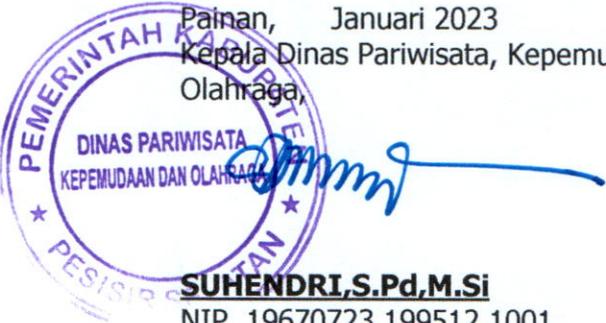
Berbagai keberhasilan yang dicapai dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah pada Tahun Anggaran 2022 patut disyukuri. Keberhasilan diraih atas kerjasama dan partisipasi semua komponen Pemerintahan Daerah, yaitu jajaran Eksekutif (Pemerintah Daerah), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan seluruh elemen masyarakat. Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya dan terima kasih kepada seluruh komponen pemangku kepentingan dan masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan yang mendukung situasi dan kondisi tetap terjaga kondusif sehingga penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan dapat berjalan tertib, lancar dan sukses.

Disamping berbagai keberhasilan yang telah dicapai, tentu masih terdapat kekurangan yang perlu ditingkatkan, melalui mekanisme penyampaian LKPJ ini Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan membuka selebar-lebarnya kepada publik untuk memberikan masukan, saran dan kritiknya guna perbaikan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di masa yang akan datang. Disamping itu pelaksanaan pembangunan Tahun 2022 dapat dijadikan tonggak untuk pembangunan Pesisir Selatan pada Pembangunan Jangka Menengah Daerah selanjutnya.

Demikian penyampaian Laporan Kinerja Pertanggungjawaban Bupati Pesisir Selatan Akhir Tahun Anggaran 2022, dengan harapan semoga kinerja pembangunan daerah senantiasa dapat lebih baik dan memiliki daya guna bagi segenap masyarakat.

Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, melimpahkan rahmat, hidayah, perlindungan dan petunjuk-NYA kepada kita semua.

Painan, Januari 2023
Kepala Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan
Olahraga,



SUHENDRI, S.Pd, M.Si
NIP. 19670723 199512 1001